

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Pers, Jakarta.
- Atmakusumah, 1982, *Tahta Untuk Rakyat Celah Celah Kehidupan Sri Sultan Hamengkubuwono X*, Gramedia, Jakarta.
- Baskoro Jati, Aryo, 2011, *Nilai – Nilai Sejarah Perjuangan dan Integrasi Negeri Ngayogyakarta*, Perkumpulan Renaissance Indonesia, Jakarta.
- , 2011, *Kedudukan dan Hubungan Keraton Yogyakarta dengan Pemerintahan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Darmawan, Adhi, 2010, *Jogja Bergolak : Diskursus Keistimewaan DIY Dalam Ruang Publik*, Kepel Press, Yogyakarta.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti, 2009, *Menggugat Keistimewaan Yogyakarta : Tarik Ulur Kepentingan, Konflik Elite dan perpecahan*. Pinus Publisher, Yogyakarta.
- Hendratno, Edie Toet, 2009, *Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Federalisme*, Graha Ilmu dan Universitas Pancasila Press, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 1999, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- Huda, Ni'matul, 2005, *Otonomi Daerah : Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- , 2010, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2013, *Daerah Istimewa Yogyakarta : Dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang – undangan di Indonesia*, Nusa Media, Bandung.
- Juanda., 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah : Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung.

- Karim, Abdul Gaffar(ed), 2003, *Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kemitraan Partnership, 2008, *Kebijakan Otonomi Khusus di Indonesia : Pembelajaran dari kasus Aceh, Papua, Jakarta, dan Yogyakarta*, Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, Jakarta.
- Keraf Gorys, 1993, *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, Penerbit Nusa Indah, Ende.
- Luthfi, Ahmad Nashih dkk, 2009, *Keistimewaan Yogyakarta Yang Diingat dan Dilupakan*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan., Jakarta.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- Nusantara, Ario Bimo (ed), 1999, *Sri Sultan Hamengkubuwono X. Meneguhkan Tahta Untuk Rakyat*. Grasindo. Jakarta.
- Rosari, Aloysius Soni BL (ed), 2011, *Monarki Yogyakarta Inkonstitusional?*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Sabarno, Hari, 2008, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soejamto, Ir. 1988, *Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mammudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemardjan, Selo, 1981, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Soemitro, Ronny Hanityo. 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indah, Jakarta.
- Soewarno,PJ, 1994, *Hamengkubuwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942 – 197*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Sunggono, Bambang, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Poerwokoesoemo, Soedarisman, 1984, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Wahyukismoyo, Heru, 2004, *Keistimewaan Jogja vs Demokratisasi*, PT Bayu Indah Grafika, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Tentang Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 22.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339.

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1.

### **Kamus**

Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

### **Jurnal dan Makalah**

Hendro Prabowo, Pluralisme Hukum dan Penguasaan Tanah DIY, *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum UGM, Edisi 48, Oktober 2004.

Jawahir Tantowi, Keistimewaan Yogyakarta Untuk Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kesejahteraan Rakyat, *Jurnal Mimbar Hukum*, Edisi Khusus, September 2007.

Ni'matul Huda. Masa Depan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Yuridis. *Jurnal Mimbar Hukum*, Edisi Khusus, September 2007.

Sugeng Istanto, Kedudukan Keraton Dalam Sistem Pemerintahan Daerah. *Jurnal Mimbar Hukum*, Edisi Khusus. September 2007.

Tri Ratnawati, Antara 'Otonomi' Sultan dan 'Kepatuhan' Pada Pusat Di Era Reformasi : Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Governance*, Vol. 2, Edisi November 2011.

### **Sumber Online**

<http://dppka.jogjaprov.go.id>, Informasi Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, diakses pada tanggal 26 Juni 2013, pukul 14.00.

<http://pkbh.uad.ac.id/?p=784>, Perbedaan Daerah Khusus dan Daerah Istimewa, diakses pada Hari Senin, 8 Juli 2013, pukul 14.30

<http://www.ugm.ac.id/id/post/page?id=354>, Konsep Pararadya dan Gubernur Utama Tak Sesuai Dengan Aspirasi Warga DIY, diakses pada Hari Selasa, 28 Mei 2013, pukul 2.20

<http://nurjatiwidodo.lecture.ub.ac.id/category/perkuliahan/pemerintahan-daerah/>, Perkuliahan Pemerintahan Daerah, diakses pada Hari Kamis, 16 Oktober 2014, pukul 12.58 WIB

<https://riesalam.wordpress.com/2011/04/27/keistimewaan-yogyakarta-dalam-perdebatan/>, Keistimewaan Yogyakarta Dalam Perdebatan, diakses pada Hari Senin, 02 Februari 2015 pukul 22.00